

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN 2021-2023**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Wahyu Hernawan Novesiam

NIM 22210048

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 2021-2023

Oleh :

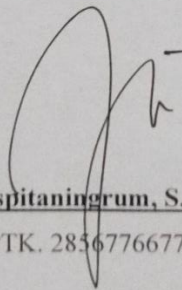
Wahyu Hernawan Novesiam

NIM 22210048

Disetujui dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 12 Januari 2026

Dosen Pembimbing



Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak.

NUPTK. 2856776677230130

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 2021-2023

Oleh :

Wahyu Hernawan Novesiam

NIM 22210048

Telah diterima dan disahkan oleh dewan Penguji Tugas Akhir

Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 12 Januari 2026

Dewan Penguji

Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.

Ketua

Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak., CAP.

Anggota

.....
.....

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta

Kepala Program Studi S1 Akuntansi


Aditva Liliyan, S.M.B., M.M.
NUPTK. 5438767668131040



Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak.
NUPTK. 2856776677230130

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hernawan Novesiam

NIM : 22210048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul :

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN 2021-2023** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir ini.

Sukoharjo, 12 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Wahyu Hernawan Novesiam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2023”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2021–2023. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

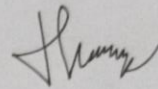
1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Bapak/Ibu pimpinan dan seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa studi.
5. Pihak Pemerintah Kabupaten Grobogan dan instansi terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
6. Kedua orang tua, keluarga, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Rekan-rekan R1 Akuntansi Angkatan 2022, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, perjuangan bersama, tawa, dan segala cerita yang mewarnai perjalanan menuntut ilmu hingga akhir. Semoga kelulusan ini menjadi awal dari kesuksesan bagi kita semua, membawa manfaat, kemudahan, serta keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita tempuh di masa depan. Semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan kita, meluaskan rezeki kita, dan menuntun kita menuju jalan terbaik sesuai rencana-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Sukoharjo, 12 Januari 2026

Peneliti,



Wahyu Hernawan Novesiam

NIM. 22210048

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACK.....	xii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.4.3 Manfaat Sosial	12
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA	13
2.1 LANDASAN TEORI	13
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.2.1 Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.2.2 Jenis Rasio Keuangan Daerah	15
2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
2.4 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Objek Penelitian	25
3.4 Jenis Dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Sistematika Analisis	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.7.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
3.7.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	31

3.7.3 Rasio Efisiensi Belanja Daerah	32
3.7.4 Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Informasi Umum	35
4.2 Penyajian Data Penelitian.....	37
4.2.1 Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan.....	37
4.2.2 Perkembangan Pendapatan Daerah.....	38
4.2.3 Perkembangan Belanja Daerah.....	39
4.2.4 Kemandirian Fiskal Daerah	40
4.2.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Keuangan	41
4.3 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Tahun 2021–2023.....	42
4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	43
4.3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	45
4.3.3 Rasio Efisiensi Belanja Daerah	46
4.3.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	47
4.3.5 Interpretasi Umum	48
4.4 Analisis dan Interpretasi Temuan	49
4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
4.4.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
4.4.3 Rasio Efisiensi Belanja Daerah	52
4.4.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	54
4.5 Keterkaitan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah.....	59
5.1.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	60
5.1.3 Efisiensi Belanja Daerah.....	61
5.1.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah	61
5.2 Implikasi Penelitian	62
5.3 Saran.....	63
5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.....	63
5.3.2 Bagi Pemerintah Pusat	64
5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	19
Tabel 4.1 Sumber: (LRA) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2023.....	38
Tabel 4.2 Nilai Rasio Data LRA Kabupaten Grobogan (2021–2023)	42
Tabel 4.4.1 Kriteria Rasio Kemandirian	50
Tabel 4.4.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah	51
Tabel 4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	53
Tabel 4.4.4 Kriteria Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	23
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1. 1 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2021

lampiran 1. 2 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2021

lampiran 2. 1 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2022

lampiran 2. 2 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2022

lampiran 3. 1 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2023

lampiran 3. 2 sumber IKPD audited kabupaten Grobogan 2023

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 2021-2023

Wahyu hernawan novesiam

22210048

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2023 pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan melalui rasio kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami perbaikan pasca pandemi, terutama dari sisi efektivitas PAD dan pertumbuhan pendapatan. Namun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, efisiensi belanja daerah belum optimal karena pertumbuhan belanja cenderung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan PAD dan pengendalian belanja daerah agar kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mendukung kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, COVID-19.

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE GROBOGAN REGENCY LOCAL GOVERNMENT, 2021–2023

Wahyu hernawan novesiam

22210048

ABSTRACK

This study aims to analyze the financial performance of the Grobogan Regency Government during the 2021–2023 period, which corresponds to the post–COVID-19 pandemic recovery phase. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data derived from the Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA). The analysis is conducted using regional financial performance ratios, including the regional financial independence ratio, the effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), the regional expenditure efficiency ratio, and the regional revenue growth ratio. The results indicate that regional financial performance showed improvement in the post-pandemic period, particularly in terms of PAD effectiveness and revenue growth. However, the level of regional financial independence remains low due to a high dependence on intergovernmental transfers from the central government. In addition, regional expenditure efficiency has not been optimal, as expenditure growth tends to outpace revenue growth. These findings suggest that the observed improvement in financial performance has not yet fully reflected strong fiscal sustainability. Therefore, efforts to increase PAD and to strengthen expenditure control are necessary to ensure that the financial performance of the Grobogan Regency Government supports fiscal independence and sustainable community welfare.

Keywords: regional financial performance, Local Own-Source Revenue (PAD), fiscal independence, COVID-19.

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintahan daerah terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur serta pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Kepala daerah yang dipilih secara demokratis menjalankan fungsi eksekutif, sementara DPRD memiliki peran dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga sebagai entitas otonom yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerah, penyediaan pelayanan publik, serta perumusan kebijakan lokal sesuai dengan

kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Purwanto & Tjenreng, 2025). Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan desentralisasi, karena daerah diberikan ruang untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, namun tetap berada dalam kerangka NKRI (UU No. 23 Tahun 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah otonom di bagian timur Provinsi Jawa Tengah memiliki karakter lingkungan perdesaan dan agraris yang kuat. Bentang alam wilayah ini didominasi oleh lahan sawah, ladang, dan tegalan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, sehingga sektor pertanian menjadi penopang utama kehidupan masyarakat melalui komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kedelai. Di bagian selatan, Kabupaten Grobogan berada dalam kawasan Pegunungan Kendeng yang membentuk lanskap perbukitan dan hutan jati, sedangkan wilayah tengah dan utara relatif datar serta dimanfaatkan secara intensif untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Grobogan sebagai daerah berbasis pertanian dan perdesaan.

Namun demikian, besarnya potensi daerah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, dan

pelayanan publik yang optimal. Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya pada kondisi infrastruktur jalan kabupaten dan desa yang belum memadai, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Selain itu, pengelolaan sektor pariwisata yang memiliki potensi wisata alam dan budaya, seperti Bleduk Kuwu dan objek wisata alam lainnya, masih terbatas dari segi fasilitas, aksesibilitas, dan promosi. Pelayanan publik, termasuk proses pembayaran pajak daerah dan layanan kesehatan, juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses, efisiensi pelayanan, serta pemerataan fasilitas dan tenaga medis, terutama di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan wilayah terhadap kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, sehingga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Salah satu daerah yang menjalankan peran tersebut adalah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai entitas administratif, kabupaten ini memikul tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Guntur Muhammad, 2024). Dalam konteks ini, kinerja keuangan daerah menjadi indikator utama untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja keuangan daerah meliputi aspek pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta tingkat kemandirian fiskal (Asriadi Putra *et al.*, 2024). Kinerja keuangan yang optimal menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Marheni & Triyanto, (2023) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagian besar daerah masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Hal serupa juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat kemandirian fiskal. Seperti banyak daerah lain, struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum menunjukkan peningkatan yang

signifikan dari tahun ke tahun. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Rahmatan & Kartini, 2025).

Pada periode 2021 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Grobogan dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah. Tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial, sehingga sejumlah program pembangunan harus ditunda, khususnya pembangunan infrastruktur daerah, pemberdayaan UMKM lokal, serta peningkatan layanan publik di wilayah perdesaan (Rohardian & Jaeni, 2022). Memasuki fase pasca pandemi, Pemerintah Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi daerah, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM yang menjadi basis perekonomian lokal, di mana penurunan aktivitas ekonomi sebelumnya turut menekan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai mengarahkan kembali belanja pada program pemulihan ekonomi, dukungan terhadap pelaku UMKM, serta percepatan belanja modal untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, meskipun kapasitas fiskal masih terbatas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan selama periode ini menjadi penting untuk menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengelola anggaran secara adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil, baik dalam menghadapi krisis maupun pada masa transisi pemulihan pasca COVID-19.

Laporan keuangan memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Grobogan. Sebagai dokumen resmi yang merefleksikan kondisi keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan, seperti pendapatan, belanja, surplus atau defisit, serta posisi aset dan kewajiban daerah, memungkinkan pemerintah menyusun rencana pembangunan yang realistis dan sesuai dengan kapasitas fiskal. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Melalui analisis realisasi anggaran dan hasil yang dicapai, pemerintah daerah bersama DPRD dan masyarakat dapat menilai efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Laporan keuangan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk penentuan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan investasi jangka panjang. Selain itu, penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban regulatif pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tersebut dapat memengaruhi penilaian kinerja keuangan daerah serta peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Grobogan.

Kualitas penyusunan laporan keuangan sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun secara tepat, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan didukung oleh data yang akurat akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kualitas tersebut meliputi ketepatan waktu, keandalan informasi, kelengkapan penyajian, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Dengan laporan yang berkualitas, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jelas kepada para pemangku kepentingan, termasuk DPRD, BPK, dan masyarakat luas. Hal ini memperkuat akuntabilitas publik karena setiap pengeluaran dan pendapatan daerah tercatat secara transparan dan dapat ditelusuri. Sebaliknya, laporan yang disusun dengan kualitas rendah berpotensi menimbulkan kesalahan, manipulasi data, atau penyalahgunaan anggaran yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan menjadi faktor kunci

dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika akuntabilitas keuangan ditegakkan, laporan keuangan yang dihasilkan cenderung lebih akurat, andal, dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena setiap transaksi dicatat dan dilaporkan dengan penuh tanggung jawab serta diawasi oleh berbagai pihak. Laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam menunjukkan bentuk akuntabilitas tersebut kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas keuangan dapat mengakibatkan penyusunan laporan yang tidak transparan, manipulatif, atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat akuntabilitas keuangan, semakin baik pula mutu dan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Rasio keuangan juga berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui analisis rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dari rasio ini

dapat diketahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab (Purba *et al.*, 2024). Rasio-rasio tersebut membantu mengevaluasi kinerja keuangan serta mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, penerapan analisis rasio keuangan mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih informatif, transparan, dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, penggunaan rasio keuangan yang tepat dapat memperkuat keandalan dan daya banding laporan keuangan antar periode maupun antar daerah. Oleh karena itu, rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai indikator kualitas laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen APBD selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2023. Analisis ini akan mencakup beberapa rasio keuangan utama, antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat;
2. Rasio Efektivitas untuk menilai pencapaian target pendapatan;
3. Rasio Efisiensi untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian hasil;

4. Rasio Pertumbuhan untuk mengukur pertumbuhan komponen keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan Kabupaten Grobogan, kendala utama yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan ke depan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan guna meningkatkan kinerja keuangan serta memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya untuk menilai pencapaian kinerja keuangan masa lalu, tetapi juga sebagai landasan dalam perencanaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang, khususnya dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Grobogan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2023 jika ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama tahun 2021–2023 berdasarkan indikator rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama dalam konteks analisis rasio keuangan daerah dan dampak pandemi terhadap keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai kondisi aktual kinerja keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan keuangan daerah.
2. Menyediakan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

3. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

1.4.3 Manfaat Sosial

1. Mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Grobogan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori dasar, temuan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang menjadi fondasi konseptual bagi pelaksanaan penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemaparan dalam bab ini disusun secara sistematis agar pembaca memperoleh pemahaman menyeluruh tentang landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Berizky & Kurniawan (2024) kinerja keuangan mencerminkan kapabilitas daerah dalam merancang, merealisasikan, serta mengendalikan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan yang optimal memperlihatkan kemampuan daerah dalam meminimalkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan sebaliknya meningkatkan kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara progresif. Sebaliknya, rendahnya kinerja keuangan menunjukkan lemahnya manajemen fiskal dan kurangnya kapasitas perencanaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial di daerah.

Untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Transparansi, yakni keterbukaan informasi keuangan kepada publik dalam setiap tahapan, dari perencanaan hingga pelaporan.
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan anggaran kepada pihak-pihak terkait.
3. Efisiensi, yakni pemanfaatan anggaran secara hemat dan tepat
4. Efektivitas, yaitu pencapaian tujuan pembangunan melalui penggunaan anggaran yang terarah.
5. Kepatuhan terhadap regulasi, yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan mendorong terciptanya sistem keuangan daerah yang profesional, transparan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

2.2.2 Jenis Rasio Keuangan Daerah

Dalam menilai kinerja keuangan daerah, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah analisis rasio keuangan. Menurut Nurrohman *et al.* (2024) analisis rasio keuangan menjadi instrumen evaluasi yang penting dalam mengukur kesehatan fiskal pemerintah daerah. Beberapa rasio yang digunakan antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pusat. Daerah yang mandiri secara finansial memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui PAD.
2. Rasio Efektivitas, yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai ketepatan proyeksi dan kemampuan optimalisasi pendapatan.
3. Rasio Efisiensi, yang digunakan untuk menilai seberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai hasil atau output kegiatan pemerintahan. Rasio ini menunjukkan

hubungan antara input anggaran dengan hasil yang diperoleh.

4. Rasio Pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur perkembangan keuangan daerah dari waktu ke waktu, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Penggunaan keempat rasio ini secara terpadu memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran secara lebih objektif dan terukur.

2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas pengelolaan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam memastikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. laporan keuangan memiliki peran penting sebagai alat kontrol, evaluasi kinerja, serta dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal (LNU, 2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam menggambarkan kondisi dan aktivitas keuangan daerah secara menyeluruh. Komponen-komponen tersebut antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil melaksanakan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Melalui LRA, publik dapat menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan dari target yang direncanakan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan. Laporan ini mencakup informasi mengenai aset (aktiva), kewajiban (liabilitas), dan ekuitas dana. Dengan adanya neraca, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana kekayaan bersih yang dimiliki daerah serta kewajiban yang harus ditanggung. Neraca menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas dan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara keseluruhan.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menjelaskan perubahan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari awal hingga akhir periode anggaran. Laporan ini merefleksikan bagaimana penggunaan dan sisa anggaran pada tahun berjalan

memengaruhi saldo akhir yang tersedia untuk digunakan di periode berikutnya. Informasi ini sangat berguna untuk menilai kebijakan belanja dan pengelolaan surplus/defisit daerah secara berkelanjutan.

4. Laporan Operasional

Laporan ini menyajikan seluruh aktivitas ekonomi pemerintah daerah selama satu periode, baik yang bersifat kas maupun non-kas. Laporan operasional menampilkan pendapatan dan beban secara akrual, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja operasional pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Berbeda dengan LRA yang berbasis kas, laporan ini mencerminkan aktivitas ekonomi sesungguhnya dan memberikan informasi tambahan yang penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas operasional.

Laporan keuangan yang disusun secara lengkap dan berkualitas mampu memberikan gambaran yang kredibel dan komprehensif mengenai kondisi keuangan suatu daerah. Laporan tersebut tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai alat evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta sebagai media akuntabilitas kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Azzahra Putri *et al.*, 2025). Dengan

demikian, laporan keuangan merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat dasar teoritis, berikut ini disajikan kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Utama
1	Kumba Digdowiseiso & Kaliwattu (2023)	Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal (Prov. D.I. Yogyakarta, 2018– 2022).	Deskriptif kuantitatif (analisis rasio fiskal).	Tingkat kemandirian fiskal masih rendah (<50), ketergantungan pusat tetap ada; efektivitas berfluktuasi.

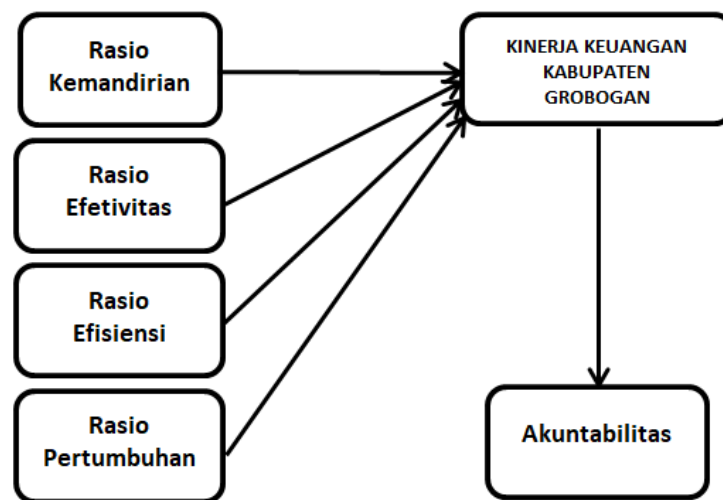
No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Utama
2	Purba / Silitonga dkk. (2022)	Evaluasi informasi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan (Kab. Langkat; periode dokumentasi 2013–2020).	Deskriptif kuantitatif (analisis informasi keuangan/rasio).	Menemukan skala otonomi dan kemandirian yang variatif; PAD dan kontribusi BUMD berpengaruh; efisiensi/efektivitas berbeda antar tahun.
3	Ursula .H , Nikson .T , Cicilia .A , Tungga (2024)	Kinerja keuangan provinsi (2019– 2023): kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi.	Studi dokumenter / analisis rasio (LRA & LKPD).	Efisiensi PAD tinggi pada beberapa tahun, tetapi kemandirian fiskal masih tergolong rendah; efektivitas belum konsisten.

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Utama
4	Maollo, Siahaya & Pelamonia (2024)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus: Kab. Maluku Tengah).	Deskriptif kuantitatif (analisis rasio keuangan APBD).	Menyajikan profil rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi; menyorot dampak struktur belanja pada kinerja fiskal.
5	M. Akib (2024)	Analisis kinerja keuangan daerah (Kab. Buton Utara, 2018–2022).	Deskriptif kuantitatif (rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan).	Menunjukkan variasi pertumbuhan pendapatan dan tantangan kemandirian fiskal; rekomendasi penguatan PAD.

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Utama
6	Fajar Rakasiwi (2024)	Penggunaan rasio keuangan (kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, efisiensi) untuk menilai kinerja kabupaten.	Kuantitatif (analisis rasio APBD/LRA).	Menemukan hubungan erat antara struktur pendapatan (PAD vs transfer) dan hasil rasio; efisiensi relatif stabil namun belanja modal terbatas.
7	Riesdi (2024)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menilai kemandirian (studi kasus/periodik).	Deskriptif kuantitatif / analisis rasio.	Fluktuasi realisasi PAD; saat realisasi meningkat, kapasitas fiskal berpotensi meningkat namun masih tergantung pada transfer.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun atas dasar bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan rasio keuangan, yang memberikan indikator objektif atas kondisi keuangan pemerintah daerah. Empat rasio utama yang dianalisis yaitu:



Gambar 2. 1 kerangka berpikir

Menurut Br Ginting *et al.* (2024) keempat rasio ini dipandang mampu mencerminkan tingkat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan secara menyeluruh. Kinerja keuangan yang baik, sebagaimana dicerminkan dalam keempat rasio tersebut, diharapkan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data keuangan selama beberapa tahun terakhir (2021–2023), penelitian ini bertujuan untuk menilai tren, tantangan, serta peluang peningkatan kinerja keuangan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2023. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah yang meliputi kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta pertumbuhan pendapatan daerah. Selain itu, bab ini juga merangkum pola umum kinerja keuangan daerah sebagai gambaran menyeluruh terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah

5.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini tercermin dari nilai rasio yang relatif tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu berada pada kisaran 16–17 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kapasitas fiskal daerah secara optimal. Temuan ini sejalan dengan

pandangan Harsono & Marhamah (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

5.1.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan secara umum mampu merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, pada akhir periode penelitian terlihat adanya penurunan tingkat efektivitas, yang tercermin dari rasio efektivitas PAD yang berada di atas 100 persen selama periode 2021 - 2023, masing-masing sebesar 122,36 persen dan 115,84 persen, kemudian menurun menjadi 108,62 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan PAD pada awal periode berjalan cukup baik, tetapi mulai melemah seiring dengan peningkatan target pendapatan yang belum sepenuhnya diimbangi oleh realisasi. Temuan ini sejalan dengan Dudin *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai tingkat pencapaian realisasi PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam APBD.

5.1.3 Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja daerah selama periode 2021–2023, kinerja pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Grobogan belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal dan cenderung berfluktuasi pada level tinggi. Hal ini tercermin dari rasio efisiensi belanja yang meningkat dari 92,17 persen pada tahun 2021 menjadi 103,80 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 99,79 persen pada tahun 2023. Secara konseptual, rasio efisiensi yang mendekati bahkan melebihi 100 persen mengindikasikan bahwa realisasi belanja daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan yang tersedia, sehingga mencerminkan lemahnya pengendalian belanja daerah. Temuan ini sejalan dengan Antasena *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa tingginya rasio efisiensi belanja mencerminkan pengelolaan anggaran yang belum optimal akibat perencanaan yang kurang efektif serta dominasi belanja operasional.

5.1.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan pendapatan daerah, pendapatan Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun masih tergolong moderat. Pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 0,13 persen pada tahun 2022 dan 1,91 persen pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya pemulihan kapasitas fiskal daerah

pascapandemi COVID-19 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mulai pulihnya beberapa sumber pendapatan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islami *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah pada masa pemulihan dipengaruhi oleh pengelolaan sumber pendapatan serta dukungan dana transfer dari pemerintah pusat.

5.2 Implikasi Penelitian

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada periode 2021–2023 menunjukkan perbaikan pascapandemi COVID-19, namun belum didukung oleh struktur fiskal yang kuat. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif efektif dan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan, tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Dampak pandemi turut menekan kapasitas ekonomi daerah dan membatasi optimalisasi PAD, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan mandiri masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Santi *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa dominasi dana transfer mencerminkan keterbatasan kemandirian fiskal daerah selama masa pandemi.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 mendorong peningkatan belanja daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial, sehingga pertumbuhan belanja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan dan berdampak pada rendahnya efisiensi

belanja daerah. Kondisi tersebut berpotensi menekan keseimbangan fiskal, sehingga diperlukan pengelolaan belanja yang lebih selektif serta penguatan sumber pendapatan daerah agar pemulihan fiskal pascapandemi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diberikan baik bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, pemerintah pusat, maupun peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, mengingat rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, khususnya sektor unggulan daerah, melalui kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan PAD.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian belanja

operasional dan mengarahkan alokasi anggaran secara lebih selektif serta berbasis kinerja agar pertumbuhan belanja tidak melampaui pertumbuhan pendapatan.

4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan proporsi belanja modal yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas basis pendapatan daerah di masa mendatang.
5. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah perlu terus dilakukan untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

5.3.2 Bagi Pemerintah Pusat

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah, khususnya melalui pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan.
2. Pemerintah pusat perlu meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana transfer, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam menyesuaikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

3. Selain itu, pemerintah pusat disarankan untuk memperkuat pendampingan dan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait perencanaan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian belanja daerah.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian agar dapat memperoleh gambaran kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang dan melihat pola keberlanjutan fiskal secara lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel atau indikator lain, seperti rasio belanja modal, rasio ketergantungan fiskal, atau analisis kualitas belanja, guna memperkaya hasil evaluasi kinerja keuangan daerah.
3. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.
4. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antar daerah (studi komparatif) untuk mengetahui posisi Kabupaten Grobogan relatif terhadap daerah lain dengan karakteristik yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 38–53. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i1.140>
- Alhabsi, R. H., Priyono, N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 213–220. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 3(1). <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i3.49>
- Asriadi Putra, S., Riyanto, V., Rachman Supartono, A., Emmanuel, J., Azhar Hagi, I., Andi Nurfauzi, M., Arsitektur, S., & dan Pengembangan Kebijakan, P. (2024). Relevansi Kemandirian Fiskal: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.4131>
- Aznurita, C., Indriasari, D., & Sulaiman, S. (2024). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan. 4(6), 1503–1509. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i6.2171>
- Azzahra Putri, D., Rahmah, M., Aulia Khairani, P., Haryanti, R., Permata Putri, S., & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 438–443. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/927>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Br Ginting, A., Manalu, C., Amelia Sinaga, D., & Studi Akuntansi, P. (2024). The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(3), 165–171. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i06.p17>

- Disastra, Y. I., Hamim, U., & Rachman, E. (2025). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN RASIO REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA. 2(4), 993–1000. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2860>
- Dudin, M., Susandra, F., & Melani, M. M. (2025). Analisis Efektivitas , Efisiensi , Kontribusi Pajak Daerah , dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2796>
- Fadhil, M., Wardana, K., & Firmansyah, A. (2025). STRENGTHENING REGIONAL REVENUE THROUGH. 7(1), 78–92. <https://doi.org/10.37641/riset.v7i1.2590>
- Guntur Muhammad. (2024). Dampak desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia : Sebuah Literature Review Prodi Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Universitas Negeri Semarang. Jurnal Ekonomi Dan Teknologi, 2(3), 1–5. <https://jetch.id/index.php/jetch/article/view/15>
- Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Harsono, I., & Marhamah, M. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Harsono, I., & Marhamah, M. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Harto, T. (2025). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Jurnal GICI Jurnal Keuangan Dan Bisnis, 17(1). <https://doi.org/10.58890/jkb.v17i1.406>
- Hasanah, N., Masdar, R., & Furqan, A. C. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. 9(2022), 2950–2962. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788> Empirical
- Hidayatuzzahroh, A., & Lisiantara, G. A. (2025). PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023). Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 8, 2330–2349. <https://doi.org/doi.org/10.31539/jry41v84>

- Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). *Fiscal Independence Analysis Based On Regional Income Structure Of Regency And City Of Central Java Province Analisis Kemandirian Fiskal Berdasarkan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. 6(6), 633–641. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i6.9593>
- Islami, R. N., Ansar, R. Bin, & Azizah, T. P. (2025). The Role of Regional Original Income, Regional Size, and Transfer Funds in Improving Regional Financial Performance. 8(2), 4745–4766. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i2.6337>
- Kumba Digdowiseiso, & Dhimas Kaliwattu. (2018). Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, 4(1), 219–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Kusumawardani, A. F., & Asrihapsari, A. (2023). Financial Performance Analysis of Local Government: A Case Study on Karanganyar Regency. EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(2), 66–80. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2023.7.2.2013>
- Latief, M. N., Wijayanti, H., Wijayanti, I., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(2), 2555–2566. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.7492>
- LNU, S. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220>
- Maollo, C. S., Siahaya, S. L., & Pelamonia, J. T. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Accounting Issues, 1(1), 101–118. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAI/article/view/2843?utm>
- Marheni, R., & Triyanto, E. (2023). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). J. Marsudi, A. Supradi , F. Susandra Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dam pertumbuhan.. 5(2), 32–46. <https://doi.org/10.30997/jakd.v5i2.2247>
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020). Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>

- Nansi, M. R., Hidayati, F., Susanti, M. E. N. T., & Dewitasari, R. P. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023. *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 64–75. <https://doi.org/10.30598/manis.8.2.64-75>
- Nurrohman, A., Suwarnigtyas, A., & Amir, V. (2024). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Dalam Era Otonomi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 74–88. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.19398>
- Nuur, M., Thoha, F., & Annisa, F. (2024). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah , Rasio Efisiensi , Rasio Desentralisasi Fiskal , dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022. 3(3), 254–263. <https://doi.org/10.70704/jpjmb.v3i3.295>
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Prabowo, O., Darmawati, & Nirwana. (2023). Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah , efisiensi keuangan daerah , derajat desentralisasi fiskal , dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia The effect of local revenue effectiveness , local financial efficiency , degree of fiscal decen. 5(5), 11. <https://doi.org/10.60036/jbm.776>
- Purba, S. (2022). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1547>
- Purba, S., Purba, R. A., Simangunsong, L. Y., Gultom, N. A. V. E., & Sinaga, A. P. R. (2024). Measuring Local Government Financial Performance With Financial Ratios. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(1), 84–100. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i1.1835>
- Purwanto & Tjenreng. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI PADA PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH DI ERA MASYARAKAT CERDAS 5.0. *Jurnal Inovasi Global*, 3(4). <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/298>
- Putri, N. A., Yulina, B., & Dwitayanti, Y. (2025). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 7, 3488–3502. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9143>
- Rahmatan, D. F., & Kartini, D. S. (2025). DESENTRALISASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK : STUDI LITERATUR TERHADAP PROGRAM TERAS MADUKARA DI KABUPATEN. *Jurnal*

- Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 06(01), 50–61. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/10642>
- Rakasiwi, F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(01), 98–107. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i01.996>
- Riesdi, A. M. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 14–33. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/38>
- Rohardian, P., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 236–258. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1824>
- Santi, Y., Prasetyo, A., Widhi, E. N., Fiskal, D. N., Modal, B., Keuangan, K., & Fiskal, D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Timur Masa Pandemi Covid-19). 2020, 37–48. <https://doi.org/10.47709/jap.v4i2.5722>
- Suharjo, F. A., & Suhendro, S. (2023). Analysis of the Effect of Regional Original Revenue Contributions and Balanced Funds on the Level of Regional Financial Independence of Provinces in Indonesia in 2019-. 2, 9. <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i3.727>
- Ursula Hadia, Nikson Tameno, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 149–168. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.706>
- Yuniasari, A., & Dyah Pravitasari. (2025). Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(3), 2028–2036. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i3.2119>
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>